

JURNAL

KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 13	No. 2	Hal. 89 - 179	Jakarta Desember 2023	ISSN 2089-6980
--------------------------------	---------	-------	---------------	--------------------------	-------------------

Terakreditasi RISTEKDIKTI : **200/M/KPT/2020**

Diterbitkan bersama :



Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan



Jaringan Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 13 Nomor 2, Desember 2023

Penanggung Jawab :

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:

Prof. Dr. Agus Heri Purnomo (*Ekonomi Sumber Daya*)

Anggota:

Prof. Dr. Harsuko Riniwati (*Sosial Ekonomi Perikanan*)

Prof. Dr. Ir. Ketut Sukiyono., DipAgEc. MEc, (*Ekonomi Pertanian*)

Dr. Armen Zulham (*Sistem Usaha Perikanan*)

Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si. (*Dinamika Populasi & Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan*)

Dr. Rani Hafsaridewi, S.K.M., M.Si. (*Sistem Usaha Perikanan*)

Dr. Achmad Rizal (*Sosial Ekonomi Perikanan*)

Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)

Redaksi Pelaksana :

Nila Mustika Wati, S.S.

Sinta Nurwijayanti, M.A.

Nendah Kurniasari, M.Si.

Rizki Aprilian Wijaya, M.T.

Freshty Yulia Arthatiani, M.Si

Heny Lestari, S.E.

Siti Nurhayati, S.Sos.

Rahadi Susetyo Friendly Muhammad, S.I.Kom.

Desain dan Tata Letak :

Ilham Ferbiansyah, S. Kom.

Alamat Redaksi :

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung BRSDM KP Lt. 3

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924

Email: kebijakan.bosek@gmail.com

Jurnal Online: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan Sertifikat Akreditasi No. 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Perikanan Berbasis Pangan Lokal “Remis” (*Corbicula Sp*): Studi Kasus Kota Palembang; (ii) Peningkatan Kinerja Sistem Rantai Pasok Ikan Nila di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu; (iii) Dampak Target Produksi Udang Dua Juta Ton Terhadap Ekonomi Kelautan Indonesia: Pendekatan Model Input-Output; (iv) Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; (v) Pengentasan Kemiskinan Etnis Bajo Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis Kearifan Lokal; (vi) Analisis Kebijakan Keberlanjutan Budidaya Udang Vaname di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan; (vii) Krisis Ekosistem Perairan Laut: Kolaborasi dan Adaptasi Nelayan Pulau Tunda.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

Redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP) menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Mitra Bestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Mitra Beestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 13 Nomor 2, Desember 2023 adalah:

1. Prof. Dr. Rilus A Kinseng (*Sosiologi Pedesaan Kebijakan - IPB University*)
2. Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc. Ph.D (*Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan - Universitas Diponegoro*)
3. Achmad Zamroni, Ph.D (*Pengelolaan Wilayah Pesisir - Badan Riset Inovasi Nasional*)
4. Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono, M.A. (*Antropologi - Universitas Gadjah Mada*)
5. Dr. Ir. Edi Susilo, MS (*Sosiologi Perikanan - Universitas Brawijaya*)
6. Maulana Firdaus, Ph.D (*Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
7. Abdul Malik, S.T., M.Si., Ph.D. (*Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan - Universitas Negeri Makassar*)
8. Dr. Nina Widyawati, M.Si (*Ilmu Komunikasi - Badan Riset Inovasi Nasional*)
9. Dr. Benny Osta Nababan, S.Pi, M.Si (*Ekonomi Sumber Daya - IB University*)
10. Dr. Najamuddin, ST, M.Si (*Ilmu Kelautan dan Lingkungan - Universitas Khairun*)
11. Drs. Ari Wahyono M.Si (*Maritim dan Kenelayanan - Badan Riset Inovasi Nasional*)
12. Bayu Vita Indah Yanti, M. Si (*Hukum Perikanan- Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
13. Christina Yuliati, M. Si (*Sosial Budaya - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
14. Radityo Pramoda, S.H., S.E., M.M (*Sistem Usaha Perikanan - Badan Riset Inovasi Nasional*)

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 13 Nomor 2, Tahun 2023

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
DAFTAR ISI	iii
Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Perikanan Berbasis Pangan Lokal “Remis” (<i>Corbicula Sp</i>): Studi Kasus Kota Palembang <i>Oleh : Putri Erlyn, Indri Ramayanti, Agus Faturobim, Alexander Akbar, Arfan Hermawan dan Bachtari Alam Hidayat</i>	89 - 100
Peningkatan Kinerja Sistem Rantai Pasok Ikan Nila di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu <i>Oleh : Irnad, Mubammad Mustopa Romdhon, Ridha Rizki Novanda, Ketut Sukiyono dan Indra Cahya Dinata</i>	101 - 112
Dampak Target Produksi Udang Dua Juta Ton Terhadap Ekonomi Kelautan Indonesia: Pendekatan Model Input-Output <i>Oleh : Subana, Kastana Sapanli dan Sadilah Fauzi</i>	113- 124
Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta <i>Oleh : Muhammad Ridha Iswardhana</i>	124 - 139
Pengentasan Kemiskinan Etnis Bajo Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis Kearifan Lokal <i>Oleh : Sam'un Mukramin, St. Haniyah, Muhammad Nawir, Lukman Ismail dan Fatmawati</i>	141 - 153
Analisis Kebijakan Keberlanjutan Budidaya Udang Vaname di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah <i>Oleh : Maria Nooza Airawati, Ibnu Fauzi, Djati Mardiatno dan Nurul Khakbim</i>	155 - 165
Krisis Ekosistem Perairan Laut: Kolaborasi dan Adaptasi Nelayan Pulau Tunda <i>Oleh : Widya Safitri dan Januar Triadi</i>	167 - 179

Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Perikanan Berbasis Pangan Lokal “Remis” (*Corbicula Sp*):
Studi Kasus Kota Palembang

Improving Household Food Security Based on Local Food “Clams” (Corbicula Sp): A Case Study in Palembang City

Putri Erllyn, Indri Ramayanti, Agus Faturohim, Alexander Akbar, Arfan Hermawan dan Bachtari Alam Hidayat

ABSTRAK

Masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Musi Kota Palembang mengandalkan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian utama namun masih menghadapi tingkat kemiskinan dan prevalensi stunting yang masih relatif tinggi masing-masing mencapai 10,48 persen (BPS, 2023) dan 14,3 persen (SSGI, 2023). Salah satu upaya untuk menurunkan prevalensi stunting adalah dengan meningkatkan konsumsi pangan yang merupakan sumber protein. Untuk mengatasi tantangan ini, salah satunya dapat dilakukan dengan cara penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan konsumsi kerang remis sebagai sumber protein. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu studi literatur, survei, dan wawancara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada 15 orang masyarakat Kampung Remis, Kelurahan 5 Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Desember 2022. Informan terdiri dari nelayan remis, penjual remis, dan masyarakat dipilih secara purposive sampling dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan utama, dan tingkat pendidikan kemudian data dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Remis sebagai sumber protein rumah tangga perikanan memiliki beberapa keuntungan yaitu ketersediaan mudah, potensi pengembangan budi daya remis dalam skala yang lebih besar secara komersial dan ramah lingkungan, dan Remis memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Beberapa tantangan sosial, ekonomi dan kebijakan yang ditemui yaitu pengetahuan dan kesadaran masyarakat, harga dan ketersediaan, regulasi dan kebijakan pemantauan kualitas dan keamanan pangan. Mengatasi tantangan ini akan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait.

Kata Kunci: ketahanan pangan; rumah tangga; remis; sumber protein; perikanan

ABSTRACT

Populations residing along the Musi River in Palembang City rely on fisheries as their primary source of income, but still face relatively high rates of poverty and stunting prevalence, reaching 10.48% (BPS, 2023) and 14.3% (SSGI, 2023), respectively. An effort to reduce the prevalence of stunting is possibly accomplished through increasing the consumption of protein-rich diets. To surmount this difficulty, food sustainability can be improved by increasing the consumption of shellfish as a source of protein. The study employs three methods: literature reviews, surveys, and in-depth interviews. The data was collected through in-depth interviews with 15 people from Kampung Remis, Kelurahan 5 Ulu, Palembang City, South Sumatra, in December 2022. The informants consisted of fishermen, vendors, and members of the community who were purposefully sampled based on age, gender, primary occupation, and level of education; the data was then qualitatively analysed and presented descriptively. Remis as a source of protein for household fishing has several advantages, including simple availability, commercially viable and environmentally friendly cultivation development potential, and high adaptability. Some social, economic, and policy challenges are knowledge and public awareness, price and accessibility, regulations and policies monitoring quality, and food security. Overcoming these challenges will require collaboration between governments, the public, the private sector, and related stakeholders.

Keywords: food security; household; clams; protein source; fishery

Peningkatan Kinerja Sistem Rantai Pasok Ikan Nila di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu

Improving Household Food Security Based on Local Food “Clams” (Corbicula Sp): A Case Study in Palembang City

Irnad, Muhammad Mustopa Romdhon, Ridha Rizki Novanda, Ketut Sukiyono dan Indra Cahya Dinata

ABSTRAK

Mitra pemasaran dalam sistem rantai pasok ikan nila di Provinsi Bengkulu berupaya memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi upaya tersebut, melalui pengkajian komprehensif terhadap kepuasan pelaku usaha dalam sistem rantai pasok komoditas tersebut. Penelitian dilakukan di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan pendekatan *Importance Performance Analysis* (IPA) yang dimodifikasi dan *Customer Satisfaction Index* (CSI), melibatkan 161 responden. Hasil menunjukkan sebagai berikut: (i) terdapat tiga saluran dalam rantai pasok ikan nila, (ii) mayoritas pelaku usaha merasakan ‘kurang puas’ terhadap pelayanan dari mitra pemasarannya, (iii) mitra pedagang antar kota memiliki persepsi ‘cukup puas’, (iv) aktor pemasok pakan perlu memperhatikan atribut resolusi konflik, bantuan kepada konsumen, fisik usaha dan layanan, (v) aktor petani ikan nila harus memberikan informasi tentang kondisi produk, kecepatan layanan dan transaksi, (vi) aktor pedagang pengumpul antar kecamatan harus mampu memberikan jaminan keamanan bertransaksi, dan jaminan standar layanan sama terhadap mitra usaha, (vii) pedagang pengumpul antar kota diharapkan memiliki *emphaty* yang tinggi terhadap pengecer, (viii) pengecer harus mampu memenuhi perbaikan kualitas, fisik, dan layanan usahanya. Implikasi kebijakan dari penelitian ini yaitu pemerintah daerah memberikan pelatihan usaha; penyuluh perikanan dapat melakukan sosialisasi mengenai pemasaran produk dan layanan cepat tanggap kepada petani ikan nila; pemerintah daerah melakukan pelatihan manajemen transaksi yang aman kepada pedagang pengumpul agar memiliki layanan penjualan yang baik; manajemen pemasaran; teknik penentuan harga jual dan meningkatkan penjualan pada pedagang pengumpul; serta pemerintah melakukan pelatihan fasilitas layanan fisik dan teknologi kepada pedagang pengecer ikan nila agar memiliki layanan penjualan yang baik.

Kata Kunci: kepuasan; kinerja; rantai pasok; ikan nila; usaha

ABSTRACT

Marketing partners in the tilapia supply chain system in Bengkulu Province strive to provide the best service to consumers. This research aims to evaluate these efforts, through a comprehensive assessment of the satisfaction of business actors in the commodity supply chain system. The research was conducted in Padang Jaya District, Bengkulu Regency, using a modified Importance Performance Analysis (IPA) approach and Customer Satisfaction Index (CSI), involving 161 respondents. The results show the following: (i) there are three channels in the tilapia supply chain, (ii) the majority of business actors feel ‘less than satisfied’ with the service from their marketing partners, (iii) inter-city trading partners have the perception of being ‘quite satisfied’, (iv) feed supplier actors need to pay attention to the attributes of conflict resolution, assistance to consumers, physical business and services, (v) tilapia farmer actors must provide information about product conditions, speed of service and transactions, (vi) inter-district collector trader actors must be able to provide guarantees transaction security, and guarantee of the same service standards for business partners, (vii) inter-city collecting traders are expected to have high empathy for retailers, (viii) retailers must be able to fulfill improvements in quality, physical and business services. The policy implications of this research are that local governments provide business training; fisheries instructors can provide outreach regarding product marketing and responsive services to tilapia farmers; regional governments conduct safe transaction management training for collecting traders so that they have good sales services; marketing Management; techniques for determining selling prices and increasing sales to collecting traders; and the government provides training on physical and technological service facilities to tilapia fish retailers so that they have good sales services.

Keywords: satisfaction; performance; supply chain; tilapia; effort

Dampak Target Produksi Udang Dua Juta Ton Terhadap Ekonomi Kelautan Indonesia:
Pendekatan Model Input-Output

*The Impact of the Two Million Ton Shrimp Production Target on Indonesia's Marine Economy:
An Input-Output Modelling Approach*

Suhana, Kastana Sapanli dan Sadilah Fauzi

ABSTRAK

Udang merupakan salah satu subsektor dibidang kelautan yang menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi kelautan nasional. Pasar udang yang cukup besar dan tahun 2021 Indonesia menjadi salah satu dari lima produsen udang terbesar di dunia merupakan peluang besar untuk terus mendorong peningkatan produksi udang di Indonesia. Tujuan penelitian yaitu menganalisis dinamika struktur ekonomi kelautan Indonesia terhadap target peningkatan produksi udang menggunakan pendekatan input-output. Data dianalisis berdasarkan tabel input-output indonesia transaksi total atas dasar harga dasar (185 Produk) Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi produk domestik bruto (PDB) bidang kelautan pada tahun 2016 sebesar 29,93% terhadap PDB Nasional. Kontribusi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana sebagian besar permintaan dan penawaran barang dan jasa bidang kelautan berasal dari domestik. Sementara itu dampak kebijakan peningkatan target produksi udang 2 juta ton tahun 2024 menunjukkan program tersebut berdampak terhadap hampir seluruh subsektor dalam bidang kelautan pada kondisi perekonomian tahun 2016. Subsektor yang terdampak paling tinggi diantaranya subsektor udang dan crustacea lainnya, sektor lainnya (selain bidang kelautan), perdagangan selain mobil dan sepeda motor, ikan, dan Barang-barang hasil kilang minyak dan gas. Hasil studi ini menunjukkan bahwa subsektor udang memiliki keterkaitan erat dengan subsektor lainnya yang ada di bidang kelautan dan diluar bidang kelautan. Oleh sebab itu untuk mengoptimalkan rencana peningkatan target produksi udang 2 juta ton tahun 2024, pemerintah perlu membenahi berbagai subsektor yang terkait.

Kata Kunci: model input-output; dinamika ekonomi kelautan; permintaan dan penawaran bidang kelautan; struktur output bidang kelautan; PDB bidang kelautan, udang

ABSTRACT

Shrimp is one of the sub-sectors in the marine sector which is one of the drivers of national marine economic growth. The shrimp market is quite large and in 2021 Indonesia is one of the five largest shrimp producers in the world is a great opportunity to continue to encourage increased shrimp production in Indonesia. The research objective was to analyse the dynamics of Indonesia's marine economic structure towards the target of increasing shrimp production using the input-output approach. Data were analysed based on the Indonesia input-output table total transactions at basic prices (185 products) in 2016. The results showed that the contribution of GDP in the marine sector in 2016 was 29.93% of the National GDP. The contribution has increased compared to previous years where most of the demand and supply of goods and services in the marine sector come from domestic. Meanwhile, the impact of the policy to increase the shrimp production target of 2 million tonnes in 2024 shows that the programme has an impact on almost all subsectors in the marine sector in 2016 economic conditions. The most affected subsectors include shrimp and other crustaceans, Other Sector (other than marine sector), trade other than cars and motorcycles, fish, and goods from oil and gas refineries. The results of this study show that the shrimp subsector is closely related to other subsectors in the marine sector and outside the marine sector. Therefore, to optimise the plan to increase the shrimp production target of 2 million tonnes by 2024, the government needs to improve various related subsectors.

Keywords: input-output model; marine economic dynamics; supply and demand of marine sectors; structure of output of marine sectors; GDP of marine sectors, shrimps

Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Indonesian Maritime Governance Analysis: Implementation of the Vision of the Yogyakarta Special Region Government

Muhammad Ridha Iswardhana

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara maritim memiliki banyak peluang dan ancaman. Hal tersebut memerlukan adanya perhatian yang lebih besar terhadap wilayah laut. Penelitian ini membahas strategi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan peluang ekonomi dan mengatasi tantangan melalui Poros Maritim Dunia. Tujuan riset ini adalah menganalisa kebijakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam pengembangan wilayah pesisir menggunakan teori geopolitik dan teori kekuatan laut. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif studi kasus. Data yang digunakan berupa data primer melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal dan publikasi daring. Penulis menemukan bahwa sinergitas penegak hukum, diplomasi maritim sudah cukup baik, namun perlu lebih aktif melibatkan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan dan peningkatan SDM masyarakat pesisir. Sementara Visi Gubernur DIY bernama Abad Samudera Hindia belum terlaksana dengan maksimal. Masyarakat membutuhkan tambahan pembangunan TPI baru dan pengembangan TPI menjadi PPN dan PPS untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus selalu memperhatikan pengelolaan laut, khususnya untuk pemanfaatan sumber daya dan pangan. Bahwa laut memiliki kekayaan alam yang berlimpah dapat digunakan meningkatkan gizi masyarakat dan pendapatan negara.

Kata Kunci: Abad Samudera Hindia; Daerah Istimewa Yogyakarta; Indonesia; laut; pengelolaan

ABSTRACT

Indonesia, as a maritime country, has many opportunities and threats. This condition requires greater attention to the sea area. This research discusses the strategy of the Government of Indonesia to increase economic opportunities and overcome challenges through the World Maritime Fulcrum. This research aims to analyze the policies of the Government of Indonesia and the Provincial Government of DIY in developing coastal areas using geopolitical theory and the theory of sea power. This study uses a qualitative case study method. The data used are primary data through interviews and secondary data obtained from books, journal articles and online publications. The author finds that the synergism between law enforcement and maritime diplomacy is good enough. However, it is necessary to involve the community more actively in the sustainable management of biological resources and to increase the human resources of coastal communities. Meanwhile, the vision of the Governor of DIY called the Century of the Indian Ocean, has not been implemented optimally. The community needs additional construction of new TPI and development of TPI to become PPN and PPS to increase the productivity and welfare of fishermen. It can be concluded that the central and regional governments must always pay attention to marine management, especially for utilising resources and food. That the sea has abundant natural wealth can be used to improve people's nutrition and state income.

Keywords: Indian Ocean Century; Yogyakarta Province; Indonesia; sea; management

Pengentasan Kemiskinan Etnis Bajo Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Berbasis Kearifan Lokal

*Poverty Alleviation of Bajo Ethnic Through Independent Learning, Independent Campus (ILIC)
Program Based on Local Wisdom*

Sam'un Mukramin, St. Haniah, Muhammad Nawir, Lukman Ismail dan Fatmawati

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kemiskinan yang dialami oleh etnis Bajo dan merumuskan model strategis dalam pengentasan kemiskinan baik secara konseptual maupun praktis melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berbasis kearifan lokal di Kabupaten Bone. Penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dari 9 orang informan secara *purposive*. Adapun hasil penelitian menunjukkan: 1) Mewujudkan kolaborasi melalui kemitraan dan kerjasama yang melibatkan para ahli, peneliti, dan akademisi melalui program MBKM berbasis lingkungan agar meningkatkan produktifitas berpikir, kreatif, inovatif dan adaptif untuk kesejahteraan etnis Bajo, 2) Pembentukan lembaga swadaya masyarakat cinta kepada alam berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kemandirian desa dan nelayan, 3) Pelaksana kelembagaan baik formal maupun informal adalah pemrakarsa yang menginisiasi/mengkoordinir hasil perencanaan desa dalam meningkatnya kesadaran potensi dan kelebihan dalam bertindak bijak, 4) Menumbuhkan organisasi rakyat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan sebagai instrumen dalam perubahan paradigma serta mempraktikkan nilai-nilai baru, dalam kehidupan sehari-hari, 5) Memiliki usaha berbasis rumah tangga, berkarakteristik jenis usaha nelayan di permukiman etnis Bajo, berbahan baku hasil laut atau usaha berbahan baku bukan hasil laut, 6) Tersedianya sarana ruang produksi mikro pengolahan hasil laut, sebagai salah satu strategi menjadikan kawasan permukiman etnis Bajo kawasan pusat pengolahan hasil laut, 7) Konservasi kawasan permukiman menjadi eko wisata lokal atau nasional serta menata tempat pengolahan hasil laut agar menjadi pusat penjualan oleh-oleh khas etnis Bajo, dan 8) Sarana infrastruktur sebagai penunjang sistem sosial dan ekonomi dalam memperkuat akses pemerintah dan swasta untuk wilayah pesisir, melalui jaringan sosial masyarakat dan bermitra dengan berbagai pihak.

Kata Kunci: pengentasan; kemiskinan; MBKM; Bajo; kearifan lokal

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the problems of poverty experienced by the Bajo tribe so that they can find and formulate strategic models in poverty alleviation both conceptually and practically through the MBKM program based on local wisdom in Bone Regency. This research is descriptive qualitative with a case study approach to 9 informants with purposive sampling. The results of the study show: 1) Realizing cooperation through partnerships and cooperation involving experts, researchers and academics through the environment-based MBKM program in order to increase thinking, creative, innovative and adaptive productivity for the welfare of the Bajo tribe, 2) Formation of non-governmental organizations that love nature functions in community empowerment to foster village and fisherman independence, 3) Institutional implementers both formal and informal are initiators who initiate/coordinate the results of village planning in increasing awareness of the potential and strength in acting wisely, 4) Growing community organizations that aim to alleviate poverty and as an instrument in changing paradigms and practicing new values, in everyday life, 5) Having a household-based business characterized by the type of fishing business in Bajo tribal settlements that are made from sea products or businesses based on sea products, 6) Availability micro production space facilities for processing marine products, as one of the strategies to make residential areas of the Bajo tribe a center for processing marine products, 7) Preservation of residential areas to become local or national ecotourism and managing marine product processing areas to become sales centers for souvenirs typical of the Bajo tribe, and 8) Infrastructure facilities to support social and economic systems in strengthening government and private access to coastal areas, through social networks and partnerships with various parties.

Keywords: alleviation; poverty; MBKM; Bajo; local wisdom

Analisis Kebijakan Keberlanjutan Budidaya Udang Vaname di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

Policy Analysis of Sustainability of Vanammei Shrimp Farming in Purworejo Regency, Central Java

Maria Nooza Airawati, Ibnu Fauzi, Djati Mardiatno dan Nurul Khakhim

ABSTRAK

Udang vaname merupakan komoditas unggul Kabupaten Purworejo. Budi daya ini dilaksanakan oleh masyarakat lokal yang berada di wilayah pesisir Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Purwodadi. Kegiatan budi daya udang saat ini diakomodir Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo tahun 2011 - 2031. Budi daya udang vaname menyebabkan sejumlah dampak negatif dengan timbulnya pencemaran limbah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan limbah dari tambak untuk mendukung keberlanjutan usaha budi daya udang vaname. Status keberlanjutan ditentukan berdasarkan lima dimensi yaitu ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan kelembagaan serta teknologi. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan survey dan wawancara petambak yang ada di wilayah pesisir kemudian diolah menggunakan RAPFISH MDS. Jumlah responden yang diwawancarai ditentukan berdasarkan teknik sampling yang dikembangkan oleh Issac dan Michael yaitu 182 responden dengan tingkat kesalahan 5% yang kemudian dibagi sesuai dengan proporsi total petambak di 3 kecamatan. Responden dipilih menggunakan metode random sampling. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Mei 2021 hingga Bulan Juni 2022. Dimensi yang kurang berkelanjutan menjadi titik berat dalam perumusan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan nilai indeks keberlanjutan usaha budi daya udang vaname di Kabupaten Purworejo sebesar 54,12 dan termasuk kategori cukup berkelanjutan. Dimensi yang statusnya kurang berkelanjutan adalah hukum dan kelembagaan serta teknologi. Untuk menjaga keberlanjutan usaha tambak udang, diperlukan kebijakan yang mengarah pada penguatan dimensi hukum dan kelembagaan berupa upaya mendapatkan kepastian hukum mengenai status tanah tambak serta penggunaan teknologi pengolahan limbah yang efisien dan sederhana.

Kata Kunci: keberlanjutan; purworejo; RAPFISH; pengelolaan; udang vaname

ABSTRACT

Vaname shrimp is a superior commodity in Purworejo Regency. This cultivation is carried out by local communities in the coastal areas of Grabag, Ngombol and Purwodadi Subdistrict. Shrimp cultivation are currently accommodated by Regional Regulation Number 27 of 2011 concerning Purworejo Regency Regional Spatial Planning for 2011 - 2031. Vaname shrimp cultivation causes negative impacts by generating waste pollution. This research aims to analyze the problem of waste from ponds to support the sustainability of vaname shrimp cultivation. Sustainability status is determined based on five dimensions, namely ecological, economic, social, legal institutional and technological. The primary data collection method was carried out by surveying and interviewing farmers in coastal areas and then processing it using RAPFISH MDS. The number of respondents interviewed was determined based on the sampling technique developed by Issac and Michael, namely 182 respondents with an error rate of 5%, which was then divided according to the total proportion of farmers in the three sub-districts. Respondents were selected using a random sampling method. The research was carried out from May 2021 to June 2022. The research results show that the sustainability index for vaname shrimp cultivation in Purworejo Regency is 54.12 (quite sustainable category). Dimensions whose status is less sustainable are legal and institutional and technological. To maintain the sustainability of the shrimp farming, policies are needed to strengthen the legal and institutional dimensions to obtain legal certainty regarding the status of pond land and the use of efficient and straightforward waste processing technology.

Keywords: management; Purworejo; RAPFISH; sustainability; vanammei shrimp

Krisis Ekosistem Perairan Laut: Kolaborasi dan Adaptasi Nelayan Pulau Tunda

Marine Ecosystem Crisis: Collaboration and Adaptation of Tunda Island Fishers

Widya Safitri dan Januar Triadi

ABSTRAK

Krisis ekosistem memberi dampak signifikan bagi nelayan Pulau Tunda. Nelayan Pulau Tunda harus menempuh proses adaptasi untuk dapat bertahan di tengah kondisi ini. Peralihan mata pencaharian menjadi salah satu tujuan adaptasi. Namun proses adaptasi tidak akan dapat dilalui tanpa kolaborasi dengan pihak lain, terutama pihak pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi antara nelayan Pulau Tunda dengan pihak pemerintah serta tahapan *collaborative governance* yang berjalan diantara mereka. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan observasi mendalam untuk mengidentifikasi jawaban yang berada dalam pengaturan sosial tertentu. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan proses *Collaborative Governance* mampu diwujudkan tidak hanya dari pihak pemerintah kepada masyarakat, tetapi dapat diwujudkan oleh masyarakat itu sendiri dan kemudian berkembang dengan kolaborasi-kolaborasi lainnya. Proses kolaborasi di Pulau Tunda menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat menentukan jalannya kolaborasi hingga siapa yang akan menjadi pihak kolaborator mereka. Kekuasaan pada kolaborasi di Pulau Tunda bukan berada di tangan pemerintah, melainkan pada keputusan kolektif masyarakat.

Kata Kunci: adaptasi; krisis ekosistem; kolaborasi; pemerintah; nelayan

ABSTRACT

The ecosystem crisis has significant implications for the fishermen of Tunda Island. In order to endure these conditions, the fishermen of Tunda Island must undergo an adaptation process. The transition of livelihoods becomes a primary objective of this adaptation. However, the adaptation process can only be successfully navigated with collaboration with external entities, particularly governmental bodies. This paper aims to analyze the collaborative process between the fishermen of Tunda Island and the government, along with the stages of collaborative governance that transpire between them. The analysis is conducted qualitatively, employing in-depth observation to identify responses within specific social frameworks. The findings of this research indicate that the Collaborative Governance process can be realized from the government to the community and initiated by the community itself, subsequently evolving through various collaborations. The collaborative process in Tunda Island exemplifies how communities determine the course of collaboration and decide who will be their collaborators. In Tunda Island, the authority in collaboration does not lie in the hands of the government but rather in the collective decisions of the community.

Keywords: alleviation; poverty; MBKM; Bajo; local wisdom



BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung BRSDM KP Lt. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Web : <https://kkp.go.id/brsdm/sosek>
email : kebijakan.asek@gmail.com

ISSN **2089-6980**



9 772089 698058